

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan disertai pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan adanya kewajiban dari setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab social perusahaan/*Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR. Perkembangan dunia usahayang semakin cepat dan diiringi dengan meningkatnya persaingan menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Keberadaan perusahaan tersebut dalam masyarakat dapat memberikan citra yang positif dan negatif. Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tentu dapat terwujud jika masyarakat dan lingkungan memiliki citra yang positif mengenai perusahaan yang bersangkutan.

Citra yang positif ini bisa di bentuk dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang secara umum dapat didefinisikan sebagai ”komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap isu

tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik". Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional merupakan wujud nyata dari pelaksanaan CSR di Perusahaan dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya di singkat PKBL. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dimana dalam Pasal 2 UU BUMN menentukan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat, Pasal 88 Ayat (1) UU BUMN menentukan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan mengikuti ketentuan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang tertuang dalam Undang-undang Nomor. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN, dimana disebutkan bahwa Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jalan tol di Provinsi Sumatra Utara.

Terdapat beberapa titik masalah yang ada di masing-masing BUMN, sehingga penyaluran PKBL masih belum mampu mencapai harapan tersebut secara maksimal, diantaranya adalah kurangnya informasi mengenai prosedur

yang berlaku pada PT. Jasa Marga pada mitra binaan dalam penyaluran dana. Karena kurangnya informasi tersebut mengakibatkan kurangnya pengajuan permohonan pinjaman modal usaha, maka perusahaan perlu adanya suatu sistem dan prosedur yang memudahkan calon mitra binaan melakukan pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dari ketidaktahuan prosedur.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PROSEDUR PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINALINGKUNGAN PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. CABANG BELMERAMEDAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang di paparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Bagaimana Prosedur Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan?**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan di peroleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adanya manfaat dari penelitian:

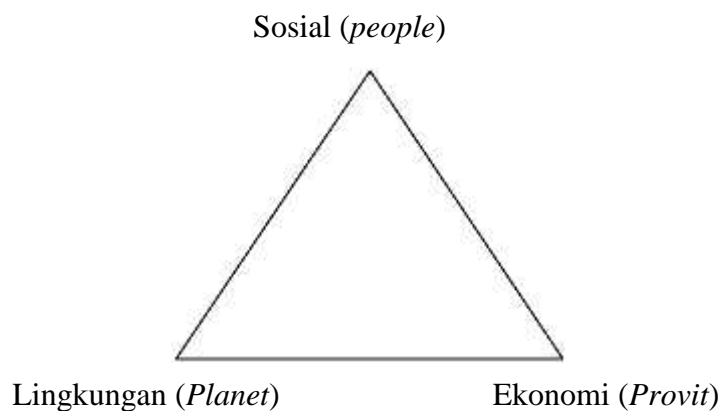
1. Bagi penulis menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya berhubungan dengan prosedur penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
2. Bagi perusahaan diharapkan agar Program Mitra Binaan PT. JASA MARGA dalam penyaluran dana tidak hanya menyalurkan bantuan dan pembinaan kepada yang memiliki usaha saja. Tetapi masyarakat yang belum memiliki usaha juga memerlukan bantuan dengan diberikan *skill* dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Selain itu penelitian ini juga dijadikan sebagai bahan masukan serta tambahan informasi untuk lebih memajukan perusahaan kedepannya khususnya dibagian PKBL.
3. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai suatu informasi dan pengetahuan yang di perlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Corporate Social Responsibility

Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah *economic prosperity, environmental quality dan social justice*. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:



Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat) dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang rusak dan masyarakat

yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan bisnisnya. Beberapa perusahaan bahkan menjadi terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menjaga keseimbangan 3P ini.

Menurut Prastowo dan Huda

Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah bisnisnya sendiri.¹

Menurut Wibisono pengertian Provit, People, Planet adalah

1. ***Profit* (keuntungan)** Profit merupakan unsur terpenting dan menjaditujuan utama dari setiap kegiatan usaha tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin
2. ***People* (masyarakat pemangku kepentingan)** Menyadari bahwamasyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat, karenanya perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

¹Prastowo, Joko dan Miftachul Huda. **Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis**: Samudra Biru, Yogyakarta, 2011

3. *Planet* (lingkungan) adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung didalamnya. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal, dengan melestarikan lingkungan, mereka justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.²

2.2. Peraturan Pemerintah Dalam Program Kemitraan

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui

1. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

²Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta, 2007

2. Peraturan Menteri BUMN nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN nomor Per-09/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2.3. Definisi dan Unsur Program Kemitraan

1. Definisi Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri. Program ini dapat dikatakan sebagai kerja sama usaha kecil dan menengah yang mengacu pada terciptanya keseimbangan, keselarasan dan ketrampilan yang di dasari saling percaya antara si pemberi pinjaman dengan calon mitra binaan.

Menurut Ardiyanto Bagas dan Achma HendraSetiawan mengungkapkan pengertian kemitraan:

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis ayang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraihkeuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan.

2. Unsur- Unsur Program Kemitraan

Menurut Subandi tentang unsur dalam usaha ekonomi

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya.³

Unsur-unsur kemitraan pada PT. Jasa Marga adalah

³Subandi.**Ekonomi Koperasi** : Teori dan Praktek.: Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010

1. Kerjasama Antara pengusaha besar dan menengah dengan usaha kecil.
Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya. Sehingga usaha kecil akan lebih berdaya atau tangguh disalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.
2. Pembinaan dan pengembangan. Pada dasarnya yang memebedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mangakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan manajemen produk.

Menurut Kasmir ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. **Kepercayaan**

Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasara pertimbangan yang diberikan oleh Bank adalah itikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini berarti nasabah memperoleh kepercayaan dan juga memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.

2. Kesepakatan

Sebelum kredit di kuncurkan, Bank dengan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian, juga di sepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila pihak peminjam melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan ini di tuangkan dalam akad kredit yang ditandatangani kedua belah pihak pada saat kredit di setuju Bank dan akan di kuncurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang di salurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir (lunas), misalnya satu tahun atau tiga tahun. Kemudian, juga termuat kapan nasabah harus membayar kewajibannya (angsuran), yang biasanya dilakukan setiap bulannya.

4. Risiko (*Degree of risk*)

Dimasa depan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap i biayai pasti memiliki risiko tidak tertagih atau macet. Hal ini di sebabkan oleh berbagai sebab, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sengaja artinya nasabah untuk tidak membayar dan tidak sengaja artinya nasabah tidak bermaksud tidak membayar melainkan adanya ketidakmampuan membayar kreditnya. Namun, nasabah akan melunasi kredit tersebut dengan berbagai cara, misalnya dengan melelang jaminan yang di berikan sebelumnya.

5. Balas Jasa

Sudah pasti Bank mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang di kuncurkannya. Keuntungan ini di sebut balas jasa.⁴

2.4. Ketentuan Program Kemitraan

Berikut merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Marga dalam penyaluran dana Program Kemitraan:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

⁴Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*.:RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima Jakarta.2012

2. Milik Warga Negara Indonesia
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
4. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
5. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 12 bulan
6. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

1. Dana Program Kemitraan yang disalurkan adalah:

- a. Maksimal Rp.200.000.000,00 atau sesuai dengan ketersediaan dana dan kebutuhan.
- b. Jasa untuk pinjaman umum sebesar 3% per tahun yang dihitung dari saldo awal tahun.
- c. Jasa untuk pinjaman berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi
- d. Jasa untuk pinjaman berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) Masa angsuran maksimal 3 tahun.

2. Tata Cara pengajuan pinjaman

Calon Mitra Binaan menyiapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pengajuan
- b. Melampirkan pada formulir pengajuan sbb:

- a) Fotocopy Akta pendirian dari Notaris untuk usaha berbentuk PT atau CV.
- b) AD/ART dan Risalah RAT tahun terakhir yang disahkan Kementerian Koperasi dan UKM setempat.
- c) Fotokopi KTP Suami dan Isteri serta Kartu Keluarga
- d) 2(dua) lembar pas foto Suami dan Isteri terbaru berukuran 4 X 6 Cm
- e) Fotokopi Jaminan (Asli di serahkan saat pengajuan disetujui/penyaluran)
- f) Foto tempat usaha
- g) Denah Lokasi tempat usaha
- h) Surat Izin Usaha
- i) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dibina oleh PKBL BUMN lainnya.

3. Maksud dan Tujuan Program

- a. Mendorong percepatan kemandirian usaha mikro dan kecil dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merata, maka perlu dilaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil baik melalui akses permodalan, manajemen, promosi dan pemasaran, dan lain - lain.
- b. Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil, koperasi dan masyarakat.

4. Faktor Penilaian Terhadap Calon Program Kemitraan

Menurut Kasmir ada dua faktor yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengadakan penilaian apakah perusahaan setuju atau tidak terhadap calon nasabah yang akan diberikan kredit, yaitu:

1. **Memperoleh informasi-informasi tentang keadaan langganan, misalnya dengan mengisi formulir-formulir sehubungan dengan keadaan informasi tentang pembelian kredit yang pernah dilakukan atau referensi-referensi kredit, bilamana sebelumnya sudah pernah melakukan penjualan kredit kepada pelanggan maka perusahaan memiliki informasi historis mengenai pola pembayaran utang dari langganan tersebut.**
2. **Menganalisa laporan keuangan dan buku besar utang untuk menentukan umur rata-rata utang dagang perusahaan calon langganan selama ini. Hasil tersebut dapat dibandingkan dengan persyaratan kredit atau *credit term* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁵**

Berikut faktor penilaian PT. Jasa Marga kepada calon Program Kemitraan:

1. Unit PKB PT. Jasa Marga (Persero) akan melaksanakan survey ke lokasi Calon Mitra Binaan untuk melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran dokumen persyaratan dan kelayakan pinjaman.
2. PKBL PT. Jasa Marga (Persero) akan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan. Keputusan tersebut dapat berupa : pengajuan ditolak seluruhnya, ditolak sebagian dan atau diterima sesuai pengajuan.

⁵ Kasmir, **Op.Cit**, hal 275

3. Penolakan sebagian atau seluruhnya atas pengajuan tidak wajib bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk memberitahukan alasannya kepada pengaju.

5. Tata Cara pembayaran angsuran

1. Pembayaran angsuran dimulai bulan berikutnya setelah pencairan pinjaman.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
3. Pembayaran dilakukan melalui dua cara yaitu tunai dengan datang langsung ke kantor dan melalui transfer antar Bank sesuai dengan perjanjian. Nilai angsuran yang disetor sesuai dengan pokok pinjaman dan jasa bulan lalu dan tunggakan.
4. Jika nilai angsuran lebih kecil dari tagihan, maka nilai angsuran yang disetor akan diperhitungkan jasa terlebih dahulu.

2.5. Prinsip-prinsip Pemberian Program Kemitraan

Menurut J.P Sitanggang ada beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit dikenal dengan 5 C yaitu :

1. *Character*

Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemberi kredit. pembayaran utang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang langganan.

2. *Capacity*

Menggambarkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi cash flow dari calon langganan.

3. *Capital*

Menunjuk kepada kekuatan finansial calon langganan terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan ratio-ratio finansial yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas penilaian kapital calon pelanggan.

4. *Collateral*

Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tetapi tekanannya adalah pada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan.

5. *Conditions*

Menunjuk kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon langganan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.⁶

Sebagian besar analisis-analisis kredit menganggap bahwa faktor yang pertama dan kedua, *character* dan *capacity*, adalah merupakan faktor-faktor yang terpenting dalam menentukan diberi tidaknya kredit kepada seorang calon mitra binaan karena hal tersebut menekankan pada kemauan dan kemampuan calon langganan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

⁶J.P Sitanggang, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta:2014

2.6. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur ataupun tahapan pemberian kredit merupakan langkah-langkah yang harus dilalui seorang pemohon kredit, mulai dari kredit diajukan sampai kredit itu disalurkan (direalisasikan) kepada nasabah hingga kredit itu lunas di bayar nasabah kepada PT. Jasa Marga (Persero).

Menurut Mulyadi pengertian Prosedur :

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.⁷

Sedangkan definisi prosedur menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2014:90) adalah

Standar Operating Procedure (SOP), atau disebut juga sebagai prosedur, adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

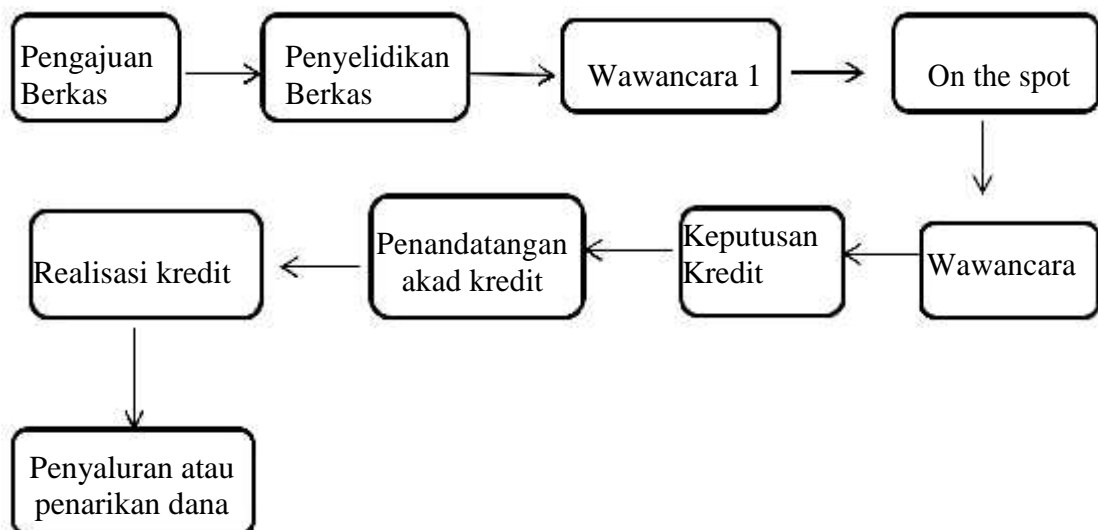
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan prosedur kerja yang tersusun yang melibatkan beberapa departemen yang saling

⁷Mulyadi. **Sistem Informasi Akuntansi**: Salemba Empat, Jakarta, 2016

berhubungan dan diperlukan dalam pelaksanaan terhadap suatu bagian dari sistem, guna menangani transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan sebuah instansi, lembaga atau perusahaan.

Berikut ini prosedur pemberian dana Program Kemitraan pada PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. Cabang Belmera, Medan

Gambar 1.1
Prosedur Pemberian Kredit
PT. Jasa Marga (Persero)Tbk. Cabang Belmera



Sumber Data: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan

1. Pengajuan Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang di tuangkan dalam suatu proposional. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang di butuhkan. Pengajuan proporsional kredit hendaknya yang berisi:

- a. Latar Belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berupa pengetahuan

dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

- b. Maksud dan Tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin di peroleh dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan mecatnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Selanjutnya proposal ini di lampiri dengan berkas-berkas yang telah di persyaratkan seperti akte notaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Neraca, dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, bukti diri dari pimpinan perusahaan, fotocopy sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang di ajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, kama nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidik kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

4. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau dengan berbagai objek yang akan di jadikan usaha atau jaminan, kemudian kemudian hasil on the spot di cocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan di berikan atau di tolak, jika diterima, maka di persiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang di terima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus di bayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum kredit di cairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad

kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit di berikan setelah penandatanganan surat-surat yang di perlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuannya dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.7. Dana Program Bina Lingkungan

Menurut Ivancevich mendefinisikan pembinaan

Pembinaan adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.⁸

Menurut Sumaatmadja (dalam Khoiri, 2013),

Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan alam merupakan lingkungan fisik yang belum atau tidak dipengaruhi budaya manusia, seperti cuaca, sinar matahari, dan sebagainya.

Menurut Sedarmayanti (dalam Rahmawanti dkk, 2014) definisi lingkungan

⁸Ivancevich, John M, Robert Konopaske dan Michael T Matteso, **Perilaku dan Manajemen Organisasi**, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.2009

kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Menurut Kementrian BUMN Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program Bina Lingkungan, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL ini bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah).

Menurut Dwi Endah mengenai sasaran Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

Masyarakat sekitar perusahaan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme bagi kelangsungan kegiatan usaha.

Dana program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PT Jasa Marga (Persero yang kegiatannya meliputi :

- a) Bantuan korban bencana alam , yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (*forcemajeur*).
- b) Bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan , yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- c) Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
- e) Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat.
- f) Bantuan pelestarian alam, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka mendukung pelestarian alam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan akan menjelaskan apa dan siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu: PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. CABANG BELMERA MEDAN khususnya pada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berlokasi di Jl. Aluminium Medan, Indonesia. Jasa Marga merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jasa jalan tol.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti dan merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Maka subjek dalam penelitian ini adalah bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengetahui informasi mengenai penyaluran dana yang disalurkan kepada mitra binaan.

3.2. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertamanya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bagian yang bertugas melakukan pinjaman modal kerja di PT. JASA MARGA khususnya pada bagian PKBL

Saifuddin Azwar mengemukakan pengertian data primer yaitu:

“Data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari”.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah diolah perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, studi perpustakaan, maupun hal lain yang terkait mengenai masalah penyaluran dana tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dengan mempelajari dokumen perusahaan, arsip yang relevan dengan peneliti, buku-buku, jurnal, dan media masa.

Saifuddin Azwar mengemukakan **“ Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya”¹⁰**

Tabel 1.2

⁹**Ibid**, hal 91

¹⁰Saifuddin Azwar, **OpCit**. Hal. 91

**Rencana Kerja dan Realisasi Program Kemitraan
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan
Tahun 2018**

NO	RUAS BELMERA	TAHUN 2018			
		RKA		REALISASI	
		MB	Rp	MB	Rp
1	Sektor Industry	10	300.000.000	2	100.000.000
2	Sektor Perdagangan	34	725.000.000	30	600.000.000
3	Sektor Pertanian	5	100.000.000	2	70.000.000
4	Sektor Perkebunan	5	100.000.000	2	60.000.000
5	Sektor Peternakan	7	75.000.000	3	60.000.000
6	Sektor Perikanan	10	150.000.000	4	80.000.000
7	Sektor Jasa	31	750.000.000	24	550.000.000
Total		102	2.200.000.000	67	1.520.000.000

Sumber Data: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera Medan 2018

Keterangan :

MB: Mitra Binaan

RKA : Rencana Kerja Anggaran

Pada tabel tersebut dapat dilihat Rencana Penyaluran dan Realisasi Penyaluran pada Tahun 2018. Dari data bisa dilihat terdapat banyak ruas sektor yang masih belum mencapai target dalam penyaluran dana kemitraan. Karena Kurangnya pengajuan permohonan pinjaman modal usaha tersebut maka perusahaan perlu adanya suatu sistem dan prosedur yang memudahkan calon mitra binaan melakukan pengajuan pinjam tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko dari ketidaktahuan setiap prosedur. Pemberian pinjaman ini bertujuan agar

membantu para pengusaha untuk meningkatkan aktivitas usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Motivasi melakukan penelitian ini adalah mengembangkan pengetahuan dan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana dari perusahaan kepada mitra binaan. Jadi dalam kegiatan penelitian ini adalah ingin memecahkan masalah dari setiap fenomena yang dihadapi.

Alasan penulis memilih PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera yang merupakan salah objek penelitian perusahaan khususnya bagian PKBL yang merupakan salah satu program BUMN. PKBL merupakan suatu wadah yang berperan dalam memberikan bantuan pinjaman modal pengembangan usaha dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, biasanya suatu metode penelitian atau lebih dipilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Metode penelitian data yang saya gunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan- pertanyaan spesifik, namun hanya memuat

point penting dari masalah yang ingin di gali dari bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. JASA MARGA (Persero) Medan.

Moh Nazir mengemukakan pengertian wawancara adalah sebagai berikut:

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)”¹¹

Menurut Imam Gunawan

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu.

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli kemudian mengolah kembali dokumen tersebut, sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan mengklasifikasikan atau menafsirkan data yang diperoleh hingga dapat memperoleh hingga dapat memberikan gambaran ataupun keterangan yang lengkap tentang teori-teori yang mendukung pemecahan masalah terkait penelitian tersebut.

¹¹Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh: Ghalia Indonesia, 2014, hal 170

¹²Imam Gunawan, **Metode Penelitian Kualitatif**: Teori dan Praktik, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 160-161.